

Kebangkitan Nasional Landasan Penting Dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Ismail Triyanto¹, Sukari²

12Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Email: ¹*ismailtriyanto747@gmail.com*, ²*sukarisolo@gmail.com*

Abstract

This research is a library research that aims to strengthen the understanding of the strategic role of education in building and maintaining the spirit of nationalism that has been instilled since the National Awakening era. The methodology in this research is to collect data from articles, books, and journals, as well as information from other internet sources originating from credible sources. After the data is collected, it is reduced by reading the abstract, if it is not relevant to the topic of discussion, it is eliminated. And if after reading the abstract, it is relevant to the topic of discussion, it is read in its entirety and compiled in a reference manager to facilitate the management of reference sources. The results of this study indicate that the National Awakening is an important historical milestone for Indonesia that marks the spirit of struggle and awareness of national identity. This study explores how the spirit of National Awakening influences and shapes the education system in Indonesia. Through historical studies and contemporary analysis, this study highlights the role of education in strengthening the spirit of nationalism as well as the challenges and opportunities faced in the context of globalization.

Keywords: *National Awakening, national education*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan memperkuat pemahaman tentang peran strategis pendidikan dalam membangun dan mempertahankan semangat Kebangsaan yang telah ditanamkan sejak masa Kebangkitan Nasional. Metodologi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data dari artikel, buku-buku, dan jurnal, serta informasi dari internet lainnya yang berasal dari sumber yang kredibel. Setelah data terkumpul direduksi dengan cara dibaca pada abstraknya, bila tidak relevan dengan topik pembahasan maka dieliminasi. Dan apabila setelah dibaca pada abstraknya ada relevansinya dengan topik pembahasan maka dibaca secara keseluruhan dan dihimpun dalam *reference manager* untuk mempermudah dalam mengelola sumber-sumber referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebangkitan nasional merupakan tonggak sejarah penting bagi Indonesia yang menandai semangat perjuangan dan kesadaran akan identitas kebangsaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana semangat kebangkitan nasional mempengaruhi dan membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Melalui kajian historis dan analisis kontemporer, penelitian ini menyoroti peran pendidikan dalam memperkuat semangat kebangsaan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks globalisasi.

Kata kunci: kebangkitan Nasional, pendidikan nasional.

Pendahuluan

Kebangkitan Nasional Indonesia yang ditandai oleh berdirinya Boedi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa Mahasiswa School Tot Oplending Van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Jakarta, merupakan periode krusial dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini, kesadaran akan identitas nasional dan keinginan untuk merdeka dari

penjajahan mulai tumbuh. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa mahasiswa STOVIA meyakini bahwa untuk membebaskan diri dari penjajah perlu adanya edukasi atau pendidikan yang memadai bagi bangsa Indonesia yang merata, tidak hanya terbatas pada kalangan elit saja. Bangsa Indonesia harus cerdas, maju dalam sosial ekonominya sehingga kesadaran akan pentingnya perjuangan kemerdekaan bangsa akan tumbuh subur dalam tubuh bangsa Indonesia atau kaum pribumi. Maka berkelilinglah Dr. Wahidin Sudirohusodo ke Kepulauan Jawa untuk menggalang dana bagi pelajar pribumi yang tidak mampu.

Dalam peristiwa Kebangkitan ini tidak hanya berdampak pada beberapa aspek penting yang ada, diantaranya: aspek politik, aspek sosial, aspek budaya dan aspek Pendidikan. Dalam dunia pendidikan tidak hanya berdampak kecil akan tetapi memiliki implikasi yang sangat mendalam, yaitu Peningkatan kesadaran nasionalisme, peran sentral pendidikan, lahirnya organisasi pergerakan, perkembangan politik, penguatan budaya lokal, akselerasi menuju kemerdekaan pembentukan sistem nilai, yang semuanya merupakan titik awal penting yang mengubah jalannya sejarah Indonesia, artinya awal kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya kemerdekaan ini dimulai dari peristiwa kebangkitan Nasional ini, meskipun ada sebuah pendapat bahwa kesadaran bangsa Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum peristiwa Kebangkitan Nasional. (Husda, 2020, hlm. 1)

Pendidikan merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertera pada data Human Development report (HDR) tahun 2020 Indonesia berada diperingkat 111 dari 189 negara di dunia. Sedangkan untuk tingkat Asean kita menduduki angka 6 (enam) setelah Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. (Ariani & Nur Bayti, 2020, hlm. 2) Dari angka itu berarti pendidikan di Indonesia masih perlu upaya yang maksimal dari berbagai pihak dalam mengiringi semangat Kebangkitan Nasional yang mewarnai kesadaran Pendidikan Nasional agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Setelah berjalan dua tahun kemudian perjalanan pendidikan Indonesia sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2022 kemarin dari jumlah bangsa Indonesia sebanyak 275,36 Jiwa hanya 6,41% dari mereka mengenyam pendidikan tinggi, yaitu 0,41% D1 dan D2, 1,28% D3, 4,39% S1, 0,31% S2, dan 0,02% S3. Selain itu Penduduk Indonesia mengenyam pendidikan hanya sampai SMA. Bila dihitung realnya per Juni 2022 menurut data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DukCapil) adalah sebagai berikut: (Affandi dkk., 2023, hlm. 7)

1. S3: 61.271 jiwa.
2. S2: 855.757 jiwa.
3. S1: 12.081.571 jiwa.
4. D3: 3.517.178 jiwa.
5. D1 dan D2: 1.126.080 jiwa.
6. SLTA: 57.533.189 jiwa.
7. SLTP: 40.035.862 jiwa.
8. Tamat SD: 64.446.545 jiwa.
9. Belum Tamat SD: 30.685.363 jiwa.
10. Tidak/Belum sekolah: 65.018.451 jiwa.

Dari data itu hasil pendidikan di Indonesia belum mencapai pada harapan dan amanah Undang-undang bahwa negara bertujuan mencerdaskan bangsa, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan sistem dan motifasi termasuk Kebangkitan nasional ini merupakan salah satu momentum yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan semangat kebangkitan nasional kesenjangan sosial dan rendahnya kesadaran hidup bermasyarakat yang menjadi bibit terjadinya budaya diskriminasi dan perundungan (bullying) harapannya bisa diatasi dan diperbaiki. (Supriyono & Irawan, 2022, hlm. 5). Penelitian yang lain ada yang membahas tentang kolerasi Kebangkitan Nasional dengan Pendidikan melalui pendekatan Kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Evimalinda yang berjudul “Membangun Semangat Kebangkitan Nasional melalui Konten Pendidikan Agama Kristen Multikultural” yang hasilnya bahwa semangat kebangkitan Nasional mengandung nilai-nilai ajaran Agama Kristen antara lain: kedamaian, kerukunan, kemakmuran, dan toleransi. (Evimalinda dkk., 2021, hlm. 1) Sedangkan penelitian yang berbasis Islam antara lain yang dikemukakan oleh Damayanti yang berjudul “Eksistensi Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional” yang hasilnya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar bisa menopang keberhasilan pembangunan nasional sehingga bangsa ini memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain adalah dengan memasukan kedalam kurikulum pendidikan di Madrasah berupa ide-ide pembaharuan yang telah diwarnai dengan semangat Kebangkitan Nasional. (Damayanti, 2022, hlm. 10)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research), yaitu sebuah metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan merekonstruksi gagasan-gagasan dari literatur yang tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun hasil riset sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti tanpa harus melakukan observasi langsung di lapangan. Dalam penelitian pustaka, peneliti berperan sebagai analis yang kritis, bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyusun, menghubungkan, serta membandingkan pemikiran dari berbagai sumber agar menghasilkan suatu konstruksi pengetahuan yang utuh. Melalui teknik ini, peneliti dapat menemukan pola, konsep, maupun teori yang relevan, sekaligus membangun kerangka konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, penelitian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan membaca dan mencatat, melainkan juga sebagai upaya intelektual untuk merumuskan sintesis baru dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang yang dikaji. (Adlini dkk., 2022, hlm. 1).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, maupun aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengalaman hidup mereka. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman menyeluruh mengenai makna di balik suatu peristiwa atau keadaan yang diteliti. Karakteristik utama pendekatan ini adalah penyajian hasil penelitian dalam bentuk deskripsi naratif yang dituangkan dengan kata-kata dan bahasa. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena

secara holistik sesuai dengan konteks khusus yang terjadi secara alamiah, bukan dalam situasi yang direkayasa. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai realitas sosial yang sedang dikaji. Selain itu, penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai metode alamiah, seperti observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, maupun studi literatur, untuk menggali data yang otentik dan sesuai dengan kenyataan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung peneliti dengan subjek penelitian, sehingga mampu menangkap nuansa, makna, serta dinamika yang tidak dapat diukur hanya dengan instrumen kuantitatif. Hasil akhirnya adalah pemahaman yang lebih kaya mengenai fenomena yang diteliti, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pengetahuan maupun praktik di lapangan. (Fattah Nasution, 2023, hlm. 47)

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan, kemudian menyusunnya kembali (merekonstruksi) sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sistematis dan komprehensif. Sumber data yang dimanfaatkan meliputi buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal akademik, serta hasil riset sebelumnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada literatur yang telah ada sebagai dasar dalam menyusun argumen dan mengembangkan kerangka konseptual. Bahan pustaka yang diperoleh tidak hanya dihimpun, tetapi juga dianalisis secara kritis dan mendalam. Analisis kritis dilakukan untuk menilai relevansi, keakuratan, serta kebaruan dari setiap sumber yang digunakan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan kesamaan, perbedaan, maupun celah dari penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan pijakan dalam memperkuat proposisi serta gagasan yang dikembangkan. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya sekadar menjadi rangkuman dari berbagai sumber, melainkan juga sebuah konstruksi pengetahuan baru yang memiliki landasan akademik yang kuat. Oleh karena itu, metode pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini berperan penting dalam menjaga keabsahan temuan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kajian yang diteliti. (Adlini dkk., 2022, hlm. 2) Dari data-data yang diperoleh itu direduksi dengan cara mengeliminasi data-data yang tidak relevan dengan pembahasan, kemudian didispalai atau disajikan data-data yang valid dan relevan dengan pembahasan untuk menarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Pendidikan pada masa kolonial Belanda memiliki corak yang sangat diskriminatif, karena akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas hanya diberikan kepada kalangan elite, bangsawan, serta golongan menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat pribumi pada umumnya hanya memperoleh pendidikan dalam bentuk sederhana, bahkan sebagian besar tidak tersentuh pendidikan formal sama sekali. Kebijakan ini sengaja diciptakan untuk mempertahankan struktur sosial yang timpang, di mana kaum terdidik digunakan sebagai alat administratif penjajah, sedangkan mayoritas rakyat tetap berada dalam keterbelakangan. Sebelum hadirnya sistem pendidikan kolonial, pendidikan di Nusantara lebih banyak bermuara pada pendidikan agama. Lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren, surau, maupun madrasah menjadi pusat pengajaran nilai-nilai akhlak, moral, serta pemahaman keagamaan. Meskipun masih sederhana, pendidikan agama ini telah berperan penting dalam membentuk karakter, etika, serta tradisi keilmuan di tengah masyarakat.

Namun seiring perkembangan zaman, pendidikan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pewarisan nilai agama, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi pembentukan karakter, akhlak, pengetahuan, serta keterampilan hidup yang lebih luas. Pada era modern, pendidikan dikembangkan melalui pengamatan, pelatihan, dan penelitian yang berbasis ilmiah. Proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada pengembangan potensi manusia secara utuh, agar mampu menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks. Dengan demikian, pendidikan saat ini menjadi instrumen strategis dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. (Affandi dkk., 2023, hlm. 3). Kebangkitan Nasional memicu kesadaran pentingnya pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan berbasis kebudayaan nasional.

A. Perjalanan Pendidikan Indonesia

Dari masa lampau hingga kini Indonesia mengalami beberapa fase khususnya dalam hal pendidikan antara lain:

1. Fase Pra kolonial.

Menurut (Hambal Shafwan, 2020) sebelum datangnya penjajah di Indonesia sebenarnya pendidikan sudah ada yaitu sejak masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Namun didalam seminar di Medan Tahun 1963 menyimpulkan bahwa datangnya Islam di Indonesia sudah sejak abad ke-7 Masehi yang di bawa oleh pedagang dan mubaligh dari negeri Arab. (Hambal Shafwan, 2020, hlm. 231) Dua hal yang menjadi ketertarikan para pedagang Islam dari Timur Tengah yaitu letak geografis Indonesia, dan kesuburan tanah Indonesia. Secara geografis Indonesia berada pada tempat yang strategis yaitu persimpangan jalan raya internasional dari jurusan timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan benua Australia. Karena kesuburan tanah di Indonesia yang menghasilkan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh bangsa lain ini juga menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi mereka untuk mendatangi Indonesia selain alasan berdagang juga dalam rangka dakwah atau menyebarkan ajaran agama. Pada masa ini pendidikan berada di masjid, mushola, pondok pesantren, dan madrasah dibawah asuhan Kyai atau Ustadz. Materi yang diberikan kepada para peserta didik terbatas pada materi keagamaan yaitu Al-Qur'an dan Fiqh, Para pendidik, guru, ustadz di masa ini tidak ada gaji atau upah, sehingga ini mendorong para pencari ilmu untuk selalu memasang hati ikhlash beramal hanya semata-mata mencari keberkahan dan ridza dari Allah SWT.

Bukti-bukti dari eksistensi pendidikan Islam yang terus beralan dan berkembang dimasa itu bisa tergambarkan dengan perkembangan Pendidikan Islam yang pesat di wilayah Jawa seperti di daerah Kudus Jawa Tengah, bisa dicontohkan dengan berdirinya Masjid Al-Abyad pada tahun 1649 yang berdiri di Kampung Kenenpan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, yang ada kedekatan dengan pendiri Menara Kudus yaitu Sunan Kudus. Dari masjid Al Abyad tersebut kesemangatan para penuntut ilmu terutama ilmu agama untuk selalu mencari ilmu dengan giat tanpa memperdulikan cita-cita material dan duniawi. Dan titik inilah Kudus menjadi kawah candradimuka untuk membuat kader penyampai agama sehingga muncul beberapa lembaga pendidikan non foermal saat itu yang cukup signifikan seperti Di wilayah

Kudus dan sekitarnya berkembang berbagai pondok pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama Islam dan pembinaan generasi muda. Masing-masing pesantren memiliki corak dan kekhasan tersendiri sesuai dengan visi para pengasuhnya. Pertama, Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an yang berada di bawah asuhan KH. Arwani (alm.), dikenal luas sebagai pesantren yang menaruh perhatian besar pada pengajaran dan penghafalan Al-Qur'an. Pesantren ini melahirkan banyak huffaz yang berkompeten dan memiliki sanad qira'ah yang terjaga. Kedua, Taswiquitullah Salafiyah di bawah asuhan KH. Ma'mun Ahmad, yang tetap konsisten menjaga tradisi salafiyah dengan menekankan kajian kitab kuning serta membentuk santri agar memiliki pemahaman agama yang mendalam.

Ketiga, Al-Irsyad yang dipimpin oleh KH. Ma'ruf, berkembang sebagai lembaga yang menyeimbangkan antara penguasaan ilmu agama dan pembinaan akhlak santri. Keempat, Ma'ahid di bawah asuhan Ustadz Tamrin, menjadi tempat pendidikan yang fokus pada penguatan dasar-dasar keislaman dan pembentukan karakter generasi muda. Kelima, Mazroatul Ulum yang dahulu diasuh oleh Kiai Maksum (alm.) dan kini diteruskan oleh Ustadz Nur Muttaqin, tetap menjaga tradisi pendidikan yang menekankan pentingnya ilmu agama sekaligus kedisiplinan. Keenam, Ma'had Ulumus Syariah Yanbu'ul Qur'an di bawah asuhan Ustadz Arifin Fanani, fokus pada pengembangan keilmuan syariah, sehingga para santri dibekali pemahaman fikih dan hukum Islam yang mendalam. Ketujuh, Takhdzibul Akhlaq, sebelumnya diasuh oleh Kiai Abu Amar (alm.) dan kini diteruskan oleh Ustadz Arifin serta Wijilan, menaruh perhatian pada pendidikan akhlak dan budi pekerti mulia sebagai pondasi utama santri.

Kedelapan, Darul Furqon yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Qodir, menjadi wadah pembinaan santri agar mampu menguasai ilmu agama dengan tetap mengutamakan nilai-nilai persaudaraan. Kesembilan, Roudlotul Muta'alimin, dahulu diasuh oleh Kiai Irsyad (alm.) dan kemudian diteruskan oleh Kiai Ma'rug Irsyad (alm.), dikenal sebagai pesantren yang memberikan perhatian besar pada pendidikan dasar agama dan penanaman tradisi keilmuan Islam klasik. Kesepuluh, Darul Falah, yang juga memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak, menegaskan peran pesantren sebagai benteng moral serta pusat pengembangan masyarakat. Keseluruhan pesantren tersebut tidak hanya berperan dalam menjaga tradisi keilmuan Islam klasik, tetapi juga menjadi pusat kaderisasi ulama, pembinaan akhlak, serta pemberdayaan masyarakat. (Mundakir, 2015, hlm. 14)

2. Fase Pendidikan Katholik

Pada fase ini dipengaruhi oleh kondisi Malaka yang saat itu dikuasai oleh Penjajah Portugis saat para penjajah awalnya ingin mencari reempah-rempah untuk dibawa dan jual ke Eropa. Para misionaris Katholik Roma disamping sebagai penasihat juga berfungsi ganda sebagai penyebar agama katholik. Metode pendidikan dan penyebaran agama katholik saat itu dengan cara mengadakan seminar-seminar dan pendirian sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 para misionaris yang diprakarsai oleh Fransiscus Xaverius mendirikan sekolahan di Ternate. Di Maluku juga berdiri sekolahan untuk para putra-putra dari petinggi pribumi (Nafrin & Hudaidah, 2021, hlm. 4). Akan tetapi posisi Portugis saat itu tidak begitu lam tergeser oleh datangnya imperialis baru yaitu Belanda, sehingga pendidikan fase katholik ini sudah mulai tergeser oleh pendidikan era Kristen Protestan.

3. Fase Pendidikan Kristen Protestan

Pendidikan pada era Kristen Protestan di masa penjajahan Belanda di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari sistem pendidikan tradisional sebelumnya. Dengan masuknya Belanda, pendidikan mulai bergerak bebas, namun pada kenyataannya sarat dengan kepentingan kolonial dan jauh dari semangat pemerataan. Sistem pendidikan yang diterapkan memiliki corak tertentu yang sangat memengaruhi perkembangan pendidikan bangsa Indonesia. Pertama, terdapat corak gradualisme, yaitu sikap lamban pemerintah Belanda dalam menanggapi perubahan dan dinamika dunia pendidikan. Pendidikan hanya diberikan pada tingkat yang sangat dasar dengan kurikulum terbatas. Bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar utama, dan hanya peserta didik berprestasi yang diperbolehkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam akses pendidikan. Kedua, muncul corak dualisme, yaitu perbedaan yang mencolok antara sekolah untuk anak-anak Eropa, pribumi, dan Tionghoa. Sistem pendidikan ini dikenal dengan *Differentiated Education System* yang menempatkan pribumi pada posisi paling rendah. Dengan demikian, pendidikan hanya memperkuat ketidakadilan sosial dan diskriminasi struktural.

Ketiga, corak kontrol sentral terlihat dari pengendalian penuh kebijakan pendidikan oleh pemerintah kolonial. Segala keputusan terkait kurikulum, bahasa pengantar, jenis sekolah, hingga alokasi dana ditentukan oleh otoritas kolonial di Batavia. Departemen Pendidikan dan Agama (*Departement van Onderwijs en Eeredienst*) berperan besar dalam pengawasan sekolah pribumi, pelatihan guru, serta pemeriksaan berkala agar semua sesuai dengan standar pemerintah Belanda. Keempat, pendidikan saat itu memiliki keterbatasan tujuan, yakni hanya untuk mencetak tenaga kerja rendahan yang dapat dibayar murah. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mencetak tenaga ahli atau pemikir, melainkan sekadar melatih keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta menanamkan kepatuhan dan loyalitas kepada Belanda. Kelima, prinsip konkordinasi juga diterapkan dengan menyamakan kurikulum antara Belanda dan Hindia Belanda. Meskipun tujuannya untuk mempertahankan penjajahan dan membatasi kemajuan bangsa Indonesia, dampak positifnya masih dapat dirasakan hingga kini, seperti adanya standarisasi kurikulum, pengawasan, efisiensi, serta pengembangan guru.

Keenam, sistem pendidikan kolonial ditandai dengan tidak adanya perencanaan pendidikan yang matang. Pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*) tidak dirancang untuk melahirkan ahli atau intelektual yang dapat melanjutkan studi ke tingkat menengah (*Middlebaar Onderwijs*) maupun perguruan tinggi (*Voortgezet Onderwijs*). Akibatnya, bangsa Indonesia terjebak dalam kebodohan yang terstruktur. Secara keseluruhan, pendidikan pada masa penjajahan Belanda bersifat sekuler dan dualistik. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan ala Barat tanpa mengindahkan nilai-nilai agama, sementara pendidikan agama berjalan secara terpisah. Sistem ini memperlihatkan bagaimana Belanda menggunakan pendidikan bukan sebagai sarana pencerahan, melainkan sebagai alat kontrol sosial dan politik agar bangsa Indonesia tetap berada dalam ketertinggalan. (Komariah, 2020, hlm. 30)

4. Fase Pendidikan Orde Baru

Fase pendidikan di Indonesia pada periode 1968 hingga 1998, yang dikenal sebagai masa Orde Baru, ditandai dengan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dasar secara masif. Perluasan ini sangat menonjol terutama sejak dilaksanakannya Pelita I dan Pelita II, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus utama pembangunan nasional. Program ini menjadi tonggak penting bagi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat pembangunan jangka panjang yang dicanangkan pemerintah pada masa itu. Dalam fase ini, pendidikan memiliki tujuan umum yang diarahkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki bekal pengetahuan, keahlian, dan perilaku dasar guna melanjutkan pendidikan, bekerja, dan mengembangkan diri sepanjang hayat. Adapun tujuan khusus di bidang pengetahuan adalah memberikan pemahaman yang fungsional mengenai dasar-dasar kenegaraan sesuai Pancasila dan UUD 1945, ajaran agama yang dianut, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, prinsip dasar matematika, pengetahuan sosial baik masa lampau maupun masa kini, kebudayaan nasional, serta pengetahuan dasar terkait kesejahteraan keluarga, kesehatan, kependudukan, dan beragam jenis pekerjaan di masyarakat.

Sementara itu, tujuan khusus di bidang keahlian menekankan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diarahkan untuk memahami cara belajar yang baik, terampil menggunakan bahasa Indonesia, mampu memecahkan masalah sederhana secara sistematis, serta sanggup bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, mereka juga didorong agar memiliki keterampilan olahraga, seni, dasar-dasar kesejahteraan keluarga, hingga keahlian praktis tertentu yang sesuai dengan minat dan kondisi lingkungan, sehingga dapat menjadi bekal dalam mencari nafkah. Tidak hanya pada aspek pengetahuan dan keterampilan, pendidikan di era Orde Baru juga menekankan tujuan khusus dalam bidang nilai dan perilaku. Peserta didik dibentuk agar menerima dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945, menghayati ajaran agama dan menghormati keyakinan orang lain, bersikap demokratis, tenggang rasa, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta terhadap sesama, bangsa, dan lingkungan. Nilai-nilai disiplin, kejujuran, kerja keras, hemat, produktif, kreatif, kritis, dan rasional turut dikembangkan untuk melahirkan generasi yang berkarakter kuat dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Dengan demikian, pendidikan pada fase 1968–1998 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk watak bangsa sesuai cita-cita Orde Baru, yakni mencetak generasi yang sehat, berilmu, terampil, serta berkepribadian Pancasila (Safei & Hudaidah, 2020, hlm. 8)

5. Fase Pendidikan Reformasi

Fase pendidikan di Indonesia pasca turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan lahirnya era Reformasi, yang membawa perubahan radikal di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Reformasi, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, adalah perubahan besar untuk perbaikan dalam aspek sosial, politik, dan keagamaan suatu masyarakat atau negara (Suharso & Retnoningsih, 2011, hlm. 415). Dalam bidang pendidikan, kebijakan yang muncul pada periode ini memperlihatkan dinamika yang kompleks, mencakup desentralisasi, penguatan pendidikan agama, hingga upaya peningkatan mutu tenaga pendidik. Pertama, kebijakan penting muncul berupa pembebasan kampus dari intervensi politik dengan dihapuskannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi

Kemahasiswaan (BKK), yang pada masa Orde Baru dianggap menghambat kreativitas mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Meski memberikan otonomi pada perguruan tinggi, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan baru berupa komersialisasi pendidikan. (Dwi Prasetyo, 2020, hlm. 9)

Kebijakan lain yang signifikan adalah otonomi daerah, termasuk dalam bidang pendidikan, serta peningkatan gaji guru secara signifikan yang diatur melalui UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat yang sama, pendidikan agama Islam (PAI) semakin diperkuat, baik melalui Keputusan Dirjen Dikti No. 263/Dikti/Kep/2000 yang menetapkan PAI sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum, maupun melalui pengesahan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan RA, madrasah, dan majelis taklim dalam sistem pendidikan formal. Di era ini, pemerintah juga menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN serta mewajibkan program Wajar Dikdas 9 tahun, baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Posisi PAI semakin diperkuat dalam kurikulum nasional, bahkan diprioritaskan dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan kurikulum turut mengalami perkembangan pesat. Dari Kurikulum 1994 lahir Kurikulum 2002, dilanjutkan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, hingga Kurikulum 2013 (K-13) yang menekankan pendekatan saintifik. Selain itu, diterapkan pula PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) untuk menciptakan suasana kelas yang partisipatif.

Beberapa kebijakan hukum juga lahir, seperti berbagai Kepmendiknas tahun 2001–2002 tentang penilaian dosen, pendidikan jarak jauh, gelar akademik, akreditasi program studi, serta kurikulum inti perguruan tinggi. Selanjutnya, muncul Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup delapan standar pokok pendidikan. Untuk pemerataan akses, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mendirikan Sekolah Bertaraf Nasional (SBN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) (meskipun kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi), serta mengembangkan kebijakan sertifikasi guru dan dosen. Dalam pemerintahan Joko Widodo, arah pendidikan semakin menekankan pendidikan karakter, penetapan Hari Santri Nasional, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta peneguhan identitas pendidikan berbasis nilai religius dan kebangsaan. Dengan demikian, periode pendidikan sejak 1998 hingga pemerintahan Joko Widodo memperlihatkan transformasi besar: dari kebebasan kampus, desentralisasi, penguatan peran agama, hingga penjaminan mutu pendidikan nasional. Semua kebijakan tersebut mencerminkan semangat reformasi, yakni memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia agar lebih inklusif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. (Suharso & Retnoningsih, 2011, hlm. 415)

B. Profil Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif. Taman Siswa hadir dengan membawa semangat kebangsaan, kebudayaan, dan kemerdekaan berpikir. Sistem pendidikan yang diterapkan menekankan pada budi pekerti, gotong royong, dan kemandirian, dengan tujuan

membentuk karakter anak bangsa yang kuat dan berkepribadian merdeka. Melalui pendidikan, rakyat Indonesia digugah kesadaran nasionalnya, ditumbuhkan semangat patriotisme, dan diarahkan untuk berjuang bersama dalam meraih kemerdekaan. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembebasan dari penjajahan, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mewujudkan berbagai tujuan bangsa. Pertama, pendidikan dijadikan alat pembangunan nasional, di mana kurikulum diarahkan untuk memperkuat identitas bangsa, menanamkan nilai Pancasila, sejarah perjuangan, serta keterampilan dasar yang berguna dalam pembangunan. Kedua, pendidikan berperan dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat pada masa Orde Baru melalui program wajib belajar enam tahun, kemudian menjadi sembilan tahun, serta pemberantasan buta huruf yang mendukung stabilitas politik dan ekonomi.

Ketiga, pendidikan dijadikan alat penanaman nilai-nilai Pancasila. Hal ini tampak dari kebijakan Orde Baru yang mewajibkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di seluruh jenjang pendidikan sebagai pondasi ideologi bangsa. Keempat, pendidikan berperan dalam pengembangan karakter. Fokusnya bukan hanya pada aspek kognitif, melainkan juga akhlak, budi pekerti, moral, dan etika agar peserta didik tumbuh sebagai pribadi yang berintegritas. Kelima, pendidikan menjadi sarana perdamaian dan penanggulangan konflik, dengan menanamkan nilai toleransi, dialog, dan rekonsiliasi sosial demi membangun masyarakat yang harmonis dan kohesif. Dengan demikian, pendidikan terbukti sebagai instrumen yang sangat efektif dalam perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ia memainkan peran penting dalam transformasi masyarakat menuju keadilan, kesetaraan, serta kemakmuran bangsa.

C. Dampak Kebangkitan Nasional dalam Pendidikan Kontemporer

Semangat Kebangkitan Nasional terus hidup dan terpatut dalam sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini. Pendidikan nasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menanamkan nilai kebangsaan, patriotisme, dan semangat persatuan. Hal ini tercermin dalam kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan serta sejarah perjuangan bangsa. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diwajibkan di semua jenjang pendidikan dengan tujuan menanamkan semangat nasionalisme pada generasi muda, sehingga mereka tumbuh sebagai pribadi yang cinta tanah air dan siap mengabdikan untuk bangsa. Dampak dari semangat kebangkitan nasional terhadap pendidikan kontemporer di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan bangsa, yang mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan. Kedua, lahirnya kurikulum nasional yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja global. Ketiga, dorongan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas melalui program peningkatan mutu guru, pembaruan kurikulum, serta pembangunan infrastruktur pendidikan.

Keempat, kebangkitan nasional juga memperkuat pendidikan karakter dan moral yang menekankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, serta kerja keras, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif. Kelima, perluasan akses pendidikan melalui program wajib belajar yang kini menjadi 12 tahun serta adanya bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Keenam, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan

melalui peran komite sekolah, pendirian sekolah swasta, madrasah, hingga pesantren yang kini telah menerapkan manajemen modern dan teknologi. (Mufron, 2020, hlm. 7) Terakhir, semangat kebangkitan nasional turut mendorong pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan media digital, serta inovasi teknologi menjadi bagian dari transformasi pendidikan modern yang terinspirasi oleh semangat perjuangan kebangsaan. Dengan demikian, kebangkitan nasional tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, melainkan juga fondasi yang terus menggerakkan pendidikan Indonesia menuju kemajuan, kemandirian, dan daya saing global. (Azmi, 2020, hlm. 5)

D. Tantangan dan Peluang

Meski semangat kebangkitan nasional terus mewarnai sistem pendidikan Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih cukup mencolok. Di kota-kota besar, fasilitas pendidikan relatif memadai dengan dukungan teknologi modern, sementara di daerah pedesaan masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas serta infrastruktur yang layak. Kualitas guru juga menjadi persoalan utama, di mana sebagian besar masih membutuhkan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme agar mampu menjawab tuntutan zaman. Selain itu, globalisasi membawa tantangan baru berupa derasnya arus budaya dan nilai-nilai asing yang berpotensi mengikis semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Kondisi ini menuntut pendidikan Indonesia agar lebih adaptif dan inovatif, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus mampu menanamkan jati diri bangsa. Pendidikan harus menjadi filter yang tidak hanya menyerap nilai positif dari globalisasi, tetapi juga melindungi peserta didik dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan karakter bangsa.

Sebagaimana diingatkan oleh Thomas Lickona, seorang pakar psikologi dari Cortland University, terdapat sepuluh tanda zaman yang dapat menjadi isyarat kehancuran sebuah bangsa. Di antaranya adalah meningkatnya sifat anarki pada remaja, kurangnya sopan santun dalam berbicara, keterpengaruhan oleh kelompok sosial dalam bertindak kekerasan, tindakan menyakiti diri sendiri, hilangnya aturan yang jelas tentang batas baik dan buruk, sifat pasif dan jumud, berkurangnya penghormatan kepada orang tua, munculnya sikap acuh serta rasis, maraknya kebohongan, hingga tumbuhnya ketidakpercayaan antar golongan yang melahirkan kecurigaan. Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada upaya membangun generasi yang berkarakter kuat, berintegritas, serta memiliki semangat kebangsaan yang kokoh. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan abad 21, dan penanaman nilai moral serta budaya bangsa. (Irawan dkk., 2022, hlm. 2)

Kesimpulan

Kebangkitan Nasional telah memberikan landasan yang kokoh bagi lahirnya sistem pendidikan di Indonesia. Semangat yang tumbuh sejak awal abad ke-20 itu menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana membangun karakter dan identitas bangsa. Nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan melalui pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang berpegang teguh pada adat ketimuran: menjunjung tinggi semangat gotong royong, memiliki rasa tanggung jawab, berani menegakkan kebaikan dengan cara yang beradab, serta mampu hidup berdampingan meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Di dalamnya, etika, sopan santun, serta penghormatan terhadap sesama menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam membangun peradaban

bangsa. Namun, memasuki era globalisasi, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Arus informasi dan budaya asing yang masuk begitu cepat membawa dampak signifikan, termasuk semakin ditinggalkannya karakter luhur bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda yang rawan tergerus oleh gaya hidup instan dan nilai-nilai individualistik. Meski demikian, semangat Kebangkitan Nasional tetap menjadi pilar penting yang dapat dijadikan pegangan. Dengan semangat tersebut, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi gempuran globalisasi sekaligus menjaga eksistensi jati diri bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus terus memperkuat penanaman nilai kebangsaan dan Pancasila, bukan hanya pada tataran kognitif, tetapi juga melalui pembiasaan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, pendidikan akan tetap relevan dalam membangun generasi yang berkarakter, berkepribadian Indonesia, dan siap bersaing di kancah global tanpa kehilangan identitasnya.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Mulyani, L. W., & SH, M. (2023). Perguruan Tinggi Sebagai Wadah untuk Mencetak Pembelajar yang Berilmu dan Berakhlak.
- Ariani, D. (2020). *Gagasan Millenial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045*. Fianosa Publishing.
- Azmi, R. D., & Aji, R. H. S. (2020). Kebangkitan Nasional: pemuda melawan pandemi global. *ADALAH*, 4(1), 179-188.
- Damayanti, I. (2022). Eksistensi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(2), 120-130.
- Prasetyo, D. D., & Wahyuningsih, N. (2023). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Pendaftaran Siswa Baru. *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 139-151.
- Evimalinda, R., Butar-butar, R. D., & Noyita, E. (2021). Membangun Semangat Kebangkitan Nasional Melalui Konten Pendidikan Agama Kristen Multikultural. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 4(1), 54-68.
- Fadilah, R., Alim, W. S., Zumrudiana, A., Lestari, I. W., Baidawi, A., & Elisanti, A. D. (2021). Pendidikan karakter. CV. Agrapana Media.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Hambal Shafwan, M. (2020). *Intisari Sejarah Pendidikan Islam* (Perpustakaan Nasional RI). Pustaka Arofah. pustakaarofah@arofahgroup.com
- Husda, H. (2020). Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional. *Jurnal Adabiya*, 21(2), 31-45.
- Irawan, M. N. L., Yasir, A., Anita, A., & Hasan, S. (2022). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4273-4280.
- Komariah, S. (2022). *Peranan Ki Hajar Dewantara dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Mufron, A. (2020). Transformasi Pondok Pesantren (Upaya Merawat Tradisi dan Modernisasi Sistem Pesantren di Era Disrupsi). *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(02), 191-208.

- Ramadhan, M. A., Syaifi, S. R. A., Arsalan, F. N., & Fitriono, R. A. (2022). Peranan Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(03), 78-84.
- Nafrin, I. A., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 456-462.
- Mundakir, M., & Ulya, U. Peer Review: Lintasan Sejarah Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Sejak Era Pra-Kolonial Dengan Diberlakukannya Perda Kabupaten Kudus Tentang Madin Takmiliah.
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-15.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Baru). Widya Karya; Perpustakaan Nasional.
- Supriyono, S., & Irawan, A. D. (2020). Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2).